

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan amandemen Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa atau disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemimpinan politik oleh kepala desa dapat menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan agenda Pemerintah Desa.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan kebijakan yang sangat luas untuk mengatur wilayahnya yang ditentukan oleh kepala desa dan pertimbangan dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun dalam kenyataannya masih ditemukan kepala desa ketika mengambil kebijakan tanpa ada kerja sama maupun persetujuan dari Badan Perwakilan desa (BPD). Dengan tidak melakukan acuan perda dan perdes yang berarti adalah undang-undang, maka kepemimpinannya akan hancur karena tidak adanya acuan yang jelas.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa Terantang juga mempunyai pola untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Adapun pola tersebut adalah :

- 1) Mengaktifkan aparatur pemerintahan.
- 2) Mengurangi peranan sekdes untuk ikut dalam pemerintahan.
1. Adapun Faktor - faktor yang menjadi pendukung kepemimpinan kepala desa Terantang adalah sebagai berikut :
 - a. Ilmu pengetahuan (*Education Level*)
 - b. Kekuasaan mutlak

Adapun faktor - faktor yang menjadi penghambat kepemimpinan kepala desa Terantang adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kepercayaan kepada aparatnya.
- b. Kurangnya kerjasama antara kepala desa dan aparatnya begitu juga masyarakat.
- c. Tidak harmonisnya hubungan antara kepala desa dengan BPD

Islam adalah agama universal. Agama Islam bukan untuk umat Nabi Muhammad saw saja, melainkan untuk seluruh umat manusia dipermukaan bumi ini. Dalam keuniversalannya juga, Islam tidak memisahkan antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan umum lainnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut :

- a. aparatur desa (yang dibawah kepemimpinan kepala desa Terantang) dalam membangun kemajuan desanya haruslah mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan kemajuan desanya serta atas dasar

kesadarannya sebagai aparatur desa yang bertanggung jawab warga dan atasannya. Sekalipun kepala desa tidak berada di kantor desa sebaiknya aparatur desa tetap bekerja sebagaimana mestinya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat desanya (yang dipimpin) harus mengetahui apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan kemajuan desanya serta atas dasar kesadarannya sebagai warga yang bertanggung jawab, tanpa adanya keraguan kepada seorang pemimpin.

- b. kepala desa akan berhasil apabila dalam menjalankan roda pemerintahan desanya, kepala desa memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Untuk memahami tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan desa, maka setiap aparatur desa harus mempunyai kemampuan (*skill*) dalam perencanaan program dan pelaksanaan tugas selaku pemerintahan desa. Disamping ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang rasional.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa ini dapat dibentuk melalui tingkat pendidikan dan keahlian (*skill*) dibidang pemerintahan. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal lalu diikuti latihan operasional (*training*) serta adanya bimbingan / penyuluhan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada aparatur pemerintahan desa.